

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENANGANAN
SAMPAH DAN KEBERSIHAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN
DAERAH BINTUNI MAJU MANDIRI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Ynigo Ortiz Rivaldo Jarangga
NPP. 29.1921

*Asdaf Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: 29.1921@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Teluk Bintuni Regency with a population that continues to increase every year. The increase in the volume of waste with large population consumption is proportional to this. Waste management in the city environment, namely the people of Teluk Bintuni Regency, has not been running as expected. **Purpose :** The purpose of the research is to find out how the role of the Department of Public Works and Spatial Planning in Teluk Bintuni Regency cooperates with the Bintuni Maju Mandiri Regional Company in handling and dealing with the obstacles encountered in the waste handling process as well as the efforts that have been made by both parties in dealing with these obstacles. existing obstacles in the handling of waste in Teluk Bintuni Regency, West Papua Province. **Methods:** In the implementation of this government applied research, the author uses the theory in this study is the theory of Soejono Soekanto descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques carried out by the author is by conducting observations, interviews and documentation. The author uses data analysis techniques by reducing data, presenting data and drawing conclusions. **Results/Findings:** Based on the observations made by the author, it can be concluded that the role of the Department of Public Works and Spatial Planning in Teluk Bintuni Regency (as the first party) cooperates with the Bintuni Maju Mandiri Regional Company (second party) in the stage of handling waste in the city environment. namely the people of Teluk Bintuni Regency have not run as expected. There are temporary garbage dumps, but vehicles such as garbage trucks are no longer suitable for use in collecting waste because they are limited, and there are also garbage trucks that are no longer feasible to operate. Likewise with other obstacles, such as the lack of facilities and infrastructure provided by the government and the level of awareness of the people of Teluk Bintuni Regency. The advice given by the authors in this study is a great hope for people who care about the environment to the Teluk Bintuni Regency government through collaboration and also a performance agreement (Memorandum Of Understanding) or MOU made in this case the Department of Public Works and Spatial Planning. (as the first party) and the Bintuni Maju Mandiri Regional Company (second party) not only handle waste (collecting garbage and throwing it in the TPA) or still in the conventional way but also by managing waste (waste is managed so that it becomes something that can be utilized). **Conclusion:** Based on the observations made by the author, it can be concluded that the role of the Department of Public Works and Spatial Planning in Teluk Bintuni Regency (as the first party) cooperates with the Bintuni Maju Mandiri Regional Company (the second party) in the stage of handling waste in the city environment, namely the community. Teluk Bintuni Regency has not run as expected.

Keywords: The role of the PUPR Service and the Bintuni Maju Mandiri Regional Company, handling, waste management, environmental cleanliness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Teluk Bintuni dengan jumlah populasi penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan volume sampah dengan konsumsi penduduk yang besar sebanding dengan hal tersebut. penanganan sampah di lingkungan kota yakni masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. **Tujuan:** Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri dalam penanganan dan kendala yang dihadapi dalam proses penanganan sampah serta upaya yang telah dilakukan kedua belah pihak dalam menangani kendala-kendala yang ada pada penanganan sampah di kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. **Metode:** Pada pelaksanaan riset terapan pemerintahan ini, penulis menggunakan Teori dalam penelitian ini adalah teori dari Soejono Soekanto Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan teknik analisis data dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni (sebagai pihak pertama) bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (pihak kedua) dalam tahapan penanganan sampah di lingkungan kota yakni masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya tempat pembuangan sampah sementara, tetapi pada kendaraan seperti truk sampah yang sudah tidak mendukung untuk digunakan dalam mengumpulkan sampah karena terbatas, dan ada pula truk sampah tidak layak lagi untuk beroperasi. Begitu pula dengan kendala-kendala lainnya, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dan tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Saran yang diberikan dari penulis dalam penelitian ini, menjadi harapan besar bagi orang yang peduli terhadap lingkungan kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui kerjasama yang dilakukan dan juga perjanjian kinerja (*Memorandum Of Understanding*) atau MOU yang dilakukan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sebagai pihak pertama) dan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (pihak kedua) bukan hanya melakukan penanganan sampah (pengumpulan sampah dan membuang di TPA) atau masih dengan cara konvensional tetapi juga dengan pengolahan sampah (sampah dikelola sehingga menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan). **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni (sebagai pihak pertama) bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (pihak kedua) dalam tahapan penanganan sampah di lingkungan kota yakni masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kata Kunci: Peran Dinas PUPR dan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri, penanganan, pengolahan sampah, kebersihan lingkungan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang berada di kawasan provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni juga merupakan kabupaten yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Manokwari yang dilakukan dengan dasar hukum dalam UU Nomor 26 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni seluas 18.148 km² atau 18,03% dari Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 24 Distrik, 2 Kelurahan dan 115 Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007. Meski memiliki wilayah yang cukup besar, pertumbuhan akan jumlah penduduk telah mengakibatkan perubahan yang cukup cepat terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan data BPS proyeksi penduduk Kabupaten Teluk Bintuni meningkat dari tahun ke tahun pada tahun 2019 sebanyak 64406.00 jiwa meningkat 65705.00 jiwa pada tahun 2020 (Bps daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2020) .

Hasil pengukuran timbulan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya pada Distrik Bintuni, Distrik Manimeri dan Distrik Tohiba diperoleh volume rata-rata sebesar 3,04 liter/orang/hari dan berat rata-rata sebesar 0,63 kg/orang/hari. Berdasarkan data volume rata-rata timbulan sampah perumahan hasil pengukuran sebesar 2,60 l/o/h, dan perbandingan % total sampah perumahan dan non perumahan sesuai SNI 19-3964-1994, maka diperoleh besaran timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai faktor estimasi local sebesar 3,46 l/o/h. bila dibandingkan dengan nilai besaran timbulan sampah nasional sebesar 2,5-2,75 liter/orang/hari untuk kategori kota kecil (SNI No. 19-3983-1995), maka nilai besaran timbulan sampah Kabupaten Teluk Bintuni lebih besar dari timbulan sampah nasional. Perbedaan ini selain dipengaruhi oleh jumlah unit penghasil sampah, juga oleh aktifitas masyarakat dalam kegiatan perdagangan, perubahan tingkat hidup dan faktor musim. Hasil kajian menunjukkan bahwa timbulan sampah jenis sampah rumah tangga mendominasi timbulan sampah kabupaten sebesar (85,65%), kemudian timbulan sampah dari sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar (14,35). Dengan mengatasi permasalahan sampah sebagai tersebut maka peran pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi di bidang persampahan dan pertamanan yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan perencanaan teknis, pengelolaan sampah, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pengelolaan sampah. Bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri Demi terciptanya Visi “Bintuni Bersih dan sehat” maka masalah sampah di Bintuni harus

cepat ditangani dan dikurangi dengan koordinasi dan melaksanakan operasionalisasi penganggulan, pengangkutan, pemusnaan, pemanfaatan sampah dan pelayanan penyediaan peralatan, serta menyiapkan rencana program dan rencana kerja. Dapat dilihat pada fungsinya yaitu pada pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana persampahan, kebersihan, pengumpulan sampah di jalan umum kota, fasilitas umum, dan pengangkutan sampah dari TPS (tempat pembuangan sementara) ke TPA. Diharapkan pemerintah menciptakan terobosan – terobosan baru dalam penanganan, dan pengelolaan dalam upaya pengurangan sampah, dengan pembatasan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan sampah atau barang yang sudah tidak dipakai. Sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan sampah yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “ PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENANGANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN DAERAH BINTUNI MAJU MANDIRI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Hasil dari pengukuran komposisi timbulan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni menampilkan bahwa timbulan sampah yang mendominasi adalah sampah organik di kabupaten Teluk Bintuni (67,12%), timbulan sampah plastik (26,30%), dan sampah organik lainnya (6,57%). Dari sumber timbulan sampah di kabupaten, ada 4 sumber yang menyumbang timbulan sampah yang cukup besar yaitu perumahan permanen (83,01%), pasar (74,01), hotel (70,52%), dan perumahan non permanen (70,27%), dan juga 10 sumber lainnya (38,36% - 68,15%). Dalam hasil pengukuran diatas, timbulan sampah dengan presentase tertinggi dari timbulan sampah lainnya adalah timbulan sampah organik, ini merupakan hal yang dipengaruhi oleh kondisi musim, pola hidup masyarakat, dan kondisi ekonomi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dilakukan oleh Maria Yoane Kristella (2015), dengan judul Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bengkayang. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan sampah oleh Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bengkayang belum terealisasi secara maksimal dan perlunya perbaikan pengelolaan sampah agar lebih baik serta terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok yang diselenggarakan oleh pemerintah, melaksanakan pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat dan melaksanakan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dengan mewujudkan Bengkayang sehat 2020.

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Bram Ardianto (2012) Strategi Uptd Kebersihan Dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Dama Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian strategi UPTD kebersihan dan persampahan Dinas PU Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan sampah ada 3 strategi; 1. Operasional pengangkutan sampah dengan kegiatan patrol; 2. Pemeliharaan alat-alat kebersihan dan persampahan; 3. Perluasan areal lahan, TPA; pengolahan sampah di TPA (pemilahan, pengomposan, dan penimbunan. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui faktor penghambat yang di temui dalam strategi pengelolaan sampah oleh UPTD Kebersihan Dan Persampahan Dinas PU Kabupaten Sukoharjo yakni keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran atau dana. Sedangkan faktor pendukung adanya dasar hukum yang tertuang dalam undang-undang pengelolaan sampah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penanganan Sampah dan Kebersihan Melalui Kerjasama dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri di Kabupaten Teluk Bintuni, metodenya yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Selain itu pengukuran/ indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni penelitian dilakukan oleh Maria Yoane Kristella (2015) dan Bram Ardianto (2012), Peneliti mengambil lingkup penelitian berpedoman dari Soekanto (2012:213) Yang meliputi yang menyatakan bahwa Norma, Kelembagaan dan Lingkungan Sosial menjadi konsep dalam mengetahui suatu Peran.

1.5 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Dalam Penanganan Sampah Dan Kebersihan Melalui Kerjasama Dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri Di Kabupaten Teluk Bintuni
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Dalam Penanganan Sampah Dan Kebersihan Melalui Kerjasama Dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri Di Kabupaten Teluk Bintuni
3. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor-faktor penghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Dalam Penanganan Sampah Dan Kebersihan Melalui Kerjasama Dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri Di Kabupaten Teluk Bintuni

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2013) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan faktafakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (interview), observasi (observation), dan dokumentasi (taking notes). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Simangunsong (2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penanganan Sampah di Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pihak Pertama dan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan *Memorandum Of Understanding* (MOU). Pada perjanjian kinerja antara Pihak Pertama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Pihak Kedua (Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri) dibagi Tugas Pokok dan Fungsi dari kedua belah pihak. Peneliti mengambil lingkup penelitian berpedoman dari Soekanto (2012:213) Yang meliputi:

1. Norma
2. Kelembagaan

3. Lingkungan Sosial

Dengan berpatokan dengan teori yang diambil oleh peneliti, sehingga peneliti dapat melihat dan memahami tentang teori dengan penelitian yang saling berkaitan. Dengan begitu, peneliti dapat mencari informasi ataupun data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dengan melihat keadaan di lapangan maka penulis akan mencoba menganalisa data yang telah diperoleh, dalam bagian ini sesuai dengan yang ada pada operasional konsep yaitu teori Soekanto soerjono. Berikut beberapa pembahasan yang penulis lakukan:

1. **Norma**

Pada proses penanganan sampah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan yaitu seagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Dan Pemulihan Sampah, walaupun bukan menjadi tugas utama sebagai pelaksana dilapangan tetapi dari pihak Dinas PUPR tetap mengawasi dan memberikan modal sebagaimana tertera pada MOU atau perjanjian kinerja yang menjadikan proses penanganan sampah dan kebersihan sampah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari kerjasama ini. Aturan sangat penting dan memang harus ada untuk ditaati dan dijalankan bukan hanya pemerintah sebagai pelaksana tetapi masyarakat juga harus mampu dan mengerti tentang permasalahan sampah dan pentingnya kebersihan, sehingga pemerintah dengan peraturan yang ada bisa mempengaruhi masyarakat. Perusahaan Bintuni Maju Mandiri juga dengan adanya aturan yang berlaku diharapkan mampu dalam meningkatkan kualitas dalam menangani permasalahan sampah dan kebersihan di Kabupaten Teluk Bintuni. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pun harus membuat peraturan yang mengatur tentang kerja pihak kedua yakni Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri dalam mengambil ahli penanganan dan juga pengelolaan sampah sehingga Perusda dapat memaksimalkan kerja pada penanganan sampah.

2. **Kelembagaan**

Kegiatan penanganan sampah memerlukan peningkatan juga dalam sarana dan prasarana agar mempermudah jalannya kegiatan penanganan sampah dan membutuhkan modal serta bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan dimana unit serta peralatan yang dimiliki perusahaan ini sudah banyak yang tidak dapat digunakan dan tidak layak lagi dalam penanganan sampah. Setiap peralatan peralatan yang digunakan sering bermasalah dan harus

terus diperbaiki, sehingga harapannya ada pengadaan dari pemerintah untuk membantu proses penanganan sampah dan kebersihan kota. Pada awal dibentuknya kerjasama, segala kegiatan yang berhubungan dengan penanganan sampah, yaitu fasilitas yang diberikan merupakan bentuk ibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri sebagai pihak kedua yang menjadi pelaksana dilapangan, namun fasilitas yang diberikan juga sudah lama digunakan sebelum diberikan, sehingga mengalami kerusakan maupun tidak dapat difungsikan lagi. Pekerjaan yang dilakukan jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai tidak akan berjalan dengan baik pula. Maka harapan dari semua pekerja bahwa mereka juga membutuhkan fasilitas yang mendukung pekerjaan mereka sehingga pekerjaan yang mereka lakukan juga dapat memberikan hasil yang optimal.

3. Lingkungan Sosial

Penanganan sampah oleh Perusda Bintuni Maju Mandiri sangat berperan dalam membersihkan sampah khususnya di daerah pasar sentral. Masih banyak sekali masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kebersihan. Namun, dengan adanya kegiatan pembersihan oleh perusda sehingga beberapa masyarakat mulai enggan untuk membuang sampah sembarangan lagi. Ini merupakan perubahan yang baik. Diharapkan agar masyarakat dapat menaati aturan yang berlaku dan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Walaupun tidak dapat dipungkiri masih juga ada oknum yang membuang sampah sembarangan, terutama pengguna jalan. Hasil dari wawancara diatas penulis dapat mengetahui bahwa Partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat membantu dalam mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang bersih dan sehat. Bekerja sama antara pemerintah, perusda dan masyarakat menjadikan lingkungan baik dalam penanganan sampah hingga merawat dan menjaga kebersihan. Walaupun masalah sampah masih terus ada, namun dengan hal ini dapat menjadi awal yang baik. Berdasarkan hasil observasi penulis, selama melaksanakan penelitian, penulis menemukan bahwa kondisi lingkungan sosial terhadap penanganan sampah sudah cukup mendukung walaupun masih memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dimana adanya gotong royong di beberapa kecamatan untuk membantu penanganan sampah.

A. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam menjalankan kegiatan kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri terhadap penanganan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan

kegiatan penanganan sampah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri sebagai pihak yang melaksanakan penanganan sampah sedang berusaha melakukan peningkatan terhadap penanganan sampah. Berkaitan dengan pelaksanaannya, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri dalam penanganan sampah.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menjadi pendukung dan memiliki peran penting dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam melakukan penanganan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni tentu ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung. Setelah melakukan kegiatan penelitian, berikut faktor pendukung yang ditemukan oleh penulis.

1. Perhatian Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang paling dibutuhkan dalam melaksanakan penanganan sampah yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri.

Hasil wawancara penulis dengan Direktur Utama Perusahaan Bintuni Maju Mandiri, Markus Samaduda, S.Sos bahwa menjelaskan bahwa :

Dalam mengatasi permasalahan sampah, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memberikan dukungan serta perhatian yang cukup baik. Mulai dari penganggaran khusus bagi penanganan sampah yang bekerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri dan juga pada beberapa sarana dan prasarana yang pada saat ini perlu diperhatikan. Sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

2. Kesejahteraan Pekerja Lapangan

Perhatian dari Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri dalam menperkerjakan para pekerja lapangan yang berjumlah 56 orang, Sopir berjumlah 6 orang dan pengawas lapangan berjumlah 3 orang dimana mulai dari perlengkapan hingga gaji yang diberikan sesuai dengan waktu kerja menjadi pendorong pekerja lapangan dalam menangani masalah sampah mulai proses awal hingga akhir. Seperti hasil wawancara penulis dengan Manajer Kebersihan Kota Valen .J. Kainama, ST selaku penanggung jawab pelaksana teknis lapangan menyatakan bahwa Memperhatikan pekerja Lapangan

terkait dengan hak dan kewajiban mereka adalah hal yang sangat penting dalam perusahaan, mereka yang menentukan apakah akan berhasil atau tidak penanganan sampah dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Teluk Bintuni sudah memberikan perhatian yang terrealisasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang namun belum sepenuhnya karena banyak sarana dan prasarana yang memerlukan unit baru dan peralatan yang layak untuk digunakan sejauh ini dirasa sudah tidak layak digunakan, dan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri dalam proses serta penanganan sampah. Namun hal ini harus terus di koordinasikan agar perhatian pemerintah dapat terealisasi sepenuhnya.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan penanganan sampah. Adapun hal yang menjadi faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai :

1. Modal

Modal merupakan hal yang terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan penanganan berkaitan dengan sampah. Dengan modal yang besar, maka kegiatan penanganan sampah yang dilakukan semakin maksimal. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memiliki modal yang cukup besar yaitu pada modal awal tahun 2019 sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) , pada tahun 2020 sebesar Rp.8.588.000.000 (delapan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan Milyar rupiah) untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah. Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri, Markus Samaduda, S.Sos yang memberikan tanggapan bahwa; Modal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah cukup besar. Namun, modal yang dianggarkan untuk penanganan sampah yang dilakukan oleh Perusda Bintuni Maju Mandiri belum optimal dan minim. Pemerintah lebih mefokuskan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur. Apalagi anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah. Kurangnya anggaran tersebut membuat penanganan sampah yang di jalankan perusda ini hanya berjalan seadanya dan tidak ada perkembangan dari unit-unit penanganan sampah karena membutuhkan modal yang cukup besar.

Berdasarkan hasil observasi yang didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa minimnya modal yang dianggarkan untuk penanganan sampah dalam sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri disebabkan oleh pengalihan anggaran yang cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur. Pemerintah lebih memfokuskan anggaran untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur berupa jalan raya di Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan kondisi infrastruktur yang semakin baik, Pemerintah berharap, bahwa pembangunan di bidang lainnya dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan kendala yang terjadi pada kebersihan kota yang terhambat akibat kurangnya sarana dan prasarana.

2. Kendaraan Operasional Truk Sampah

Operasionalisasi kerja armada truk sampah saat ini memiliki cukup banyak kendala. Kondisi kendaraan truk sampah yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan penanganan sampah di bidang operasional dan pemuatan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara menuju ke tempat pembuangan akhir. Kendaraan yang dimiliki berjumlah 4 truk sampah dan 3 pick up, dengan 6 sopir dan 56 pekerja lapangan. Dengan meningkatnya jumlah sampah serta pertambahan jumlah penduduk yang diperkirakan akan terus meningkatkan volume sampah kendaraan operasional truk dituntut untuk menambahkan unit baru terkait kendaraan operasional sampah yang lebih mudah dan dapat menjangkau lebih banyak pengangkutan sampah. Dari hasil wawancara dan juga observasi penulis kepada pengawas lapangan, Andre Rumbiak yang menyatakan bahwa ; Dalam proses penanganan sampah ini salah satu masalah yang ditemukan adalah ketersediaan kendaraan operasional truk sampah yang masih minim. Jumlah anggota lapangan yang membantu pada pengguna sarana kendaraan operasional truk yang banyak menuntut pihak Perusda untuk menambah jumlah kendaraan operasional truk sampah. Banyak sampah yang harus diangkut mengalami keterlambatan dan penumpukan di beberapa TPS karena ketersediaan kendaraan operasional truk sampah yg dalam kondisi tidak layak. Sehingga jumlah sampah yang dapat diangkut juga minim sehingga terjadi penumpukan tiap harinya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Admin Kebersihan Kota, Nunung Arisanty, ST memberikan penjelasan bahwa; Kendaraan operasional menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan sampah karena beberapa unit sudah tidak layak lagi digunakan dan mengalami kerusakan sehingga memerlukan unit baru agar proses penanganan sampah tetap berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan hasil observasi yang didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan

oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa hal inilah yang menjadi salah satu kendala dimana kendaraan operasional truk sampah perlu dilakukan penambahan, sehingga kapasitas sampah yang diangkut dapat ditingkatkan.

1. Kesadaran Masyarakat

Selain tingkat kesadaran petugas, kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam melakukan penanganan sampah di Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri setelah penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, penulis menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih sangat kurang. Hal tersebut juga didukung oleh Manajer Kebersihan Kota, Valen .J. Kainama, ST yang mengatakan bahwa; Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta kebersihan kota Bintuni yang diberikan oleh pemerintah masih sangat kurang. Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni belum mampu merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Dapat dilihat dari kondisi bak sampah yang seharusnya sampah-sampah tersebut itu tersebut dibuang ke dalam bak sampah, namun masih juga tidak diperhatikan dan di biarkan berserakan. Sehingga membuat masyarakat dan petugas lain merasa tidak nyaman. Tingkat kebersihan yang kurang baik dapat mempengaruhi kebersihan penanganan sampah yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi, penulis menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni memang masih sangat kurang dan dapat dilihat langsung keadaan yang terjadi di lapangan seperti sampah berserakan di luar bak sampah dan tidak dibuang langsung ke dalam bak sampah yang telah disediakan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri.

2. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri. Sebagai pengawas lapangan pada Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri, Andre Rumbiak menyatakan bahwa; Dalam kegiatan penanganan sampah dengan memilah atau memisahkan sekumpulan sampah menjadi yang ada menurut jenis atau kelompok sampah, dimana banyak sampah di bawa dan dipilah dulu di TPS sehingga mengalami keterlambatan. Pemilahan ini bertujuan untuk menghindari sampah yang dapat berbahaya jika dibakar, sampah basah dan kering. Berdasarkan hal tersebut, terjadi pada tempat-tempat seperti lokasi bengkel motor maupun mobil, berkaitan dengan sampah-sampah industrial yang membuang sampah sembarang dan kadang tidak peduli, juga tidak menyediakan tempat sampah bagi sampah mereka sehingga berceceran. Diharapkan pada para pengelola atau pemilik bengkel agar berkaitan dengan sampah industri agar langsung dibuang ke TPA.

B. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting utama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaruan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Yoane Kristella (2015), dengan judul Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bengkayang. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan sampah oleh Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bengkayang dan juga Bram Ardianto (2012) Strategi Uptd Kebersihan Dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Dama Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian strategi UPTD kebersihan dan persampahan Dinas PU Kabupaten Sukoharjo yaitu teori yang digunakan oleh penulis dan peneliti terdahulu untuk penelitian dan fokus penelitian yang peneliti ambil ialah berbeda dalam mengetahui kinerja organisasi.

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengamatan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri terkait dengan peran masing-masing pihak dan hasil kerjasama dan penanganan sampah dan mewujudkan kebersihan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri dalam penanganan sampah dan kebersihan di Kabupaten Teluk Bintuni belum maksimal karena :
 - a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri merupakan pemberian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum cukup mendukung dalam penanganan sampah karena terbatasnya kewenangan dan anggaran, juga berkaitan dengan kendaraan operasional. Harapan terbesar adalah pengadaan unit baru terkait dengan sarana dan prasarana pendukung.
 - b. Penanganan sampah masih menggunakan metode konvensional atau cara lama yaitu, pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan dengan cara dibakar.
- 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri di Kabupaten Teluk Bintuni
 - Faktor Pendukung :
 - a. Perhatian Pemerintah dalam mendukung dan menganggarkan penanganan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni.

- b. Kesejahteraan Pekerja Lapangan dalam penanganan sampah, mulai dari perlengkapan hingga gaji yang diberikan sesuai dengan waktu kerja sehingga menjadi motivasi dalam bekerja.
- Faktor Penghambat :
 - a. Kurangnya Modal dalam penanganan Sampah
 - b. Kurangnya jumlah Kendaraan operasional truk sampah
 - c. Kesadaran Masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya penanganan sampah
 - d. Pemilahan sampah yang memakan waktu

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, jarak dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Orang Tua Saya, IKAPTK Kabupaten Teluk Bintuni, Dosen pembimbing I, Dosen pembimbing II, serta Dosen Penguji, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni, Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri serta jajaran, seluruh dosen pengajar, rekan, teman, saudara, kekasih dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Simangunsong, Fernandes. 2021. *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*, Bandung: Alfabeta .
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Suswanto dan Thoha .2012 *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sucipto, C.D.S. 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Sucipto, Cecep Dani. 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta: Gosyen Publishing

Roni Kastaman dan Ibnu Umar. 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu Silarsatu*, Bandung: Humaniora.

Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Media Group.

Simangunsong. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta Fuad.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

